



Deklarasi Hak-Hak



Kesepuluh amandemen Konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Hak-Hak diloloskan lewat dua pertiga suara dari Kongres A.S. pertama dan kemudian diratifikasi oleh tiga perempat dari badan legislatif negara bagian. *Badan Arsip Nasional*

KARENA BANYAK WARGA NEGARA KHAWATIR PEMERINTAH PUSAT BARU YANG DIBENTUK BERDASARKAN KONSTITUSI A.S. AKAN MENJADI TERLALU BERKUASA, AMANDEMENT DIUSULKAN UNTUK MELINDUNGI KEBEBASAN BERBICARA, KEBEBASAN PERS, KEBEBASAN DARI AGAMA, DAN HAK-HAK DASAR LAIN. SEPULUH DIBERLAKUKAN. KESEPULUH HAK ITU KINI DIKENAL SEBAGAI DEKLARASI HAK-HAK.

Amandemen 1

(Diratifikasi pada 15 Desember, 1791)

Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama, atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak-hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada Pemerintah agar menanggapi keluhan.

Amandemen II

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Sebuah Milisi yang diatur secara baik, dibutuhkan demi keamanan dari sebuah Negara bebas, hak dari rakyat untuk memiliki dan mempergunakan Senjata, tidak boleh dibatasi.

Amandemen III

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Tentara tidak boleh, pada masa damai ditempatkan dalam rumah mana pun, tanpa seizin pemiliknya, juga tidak pada masa perang, kecuali kalau diatur oleh hukum.

Amandemen IV

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Hak rakyat untuk merasa aman dalam keberadaan diri mereka, dalam rumah mereka, dalam catatan tertulis mereka, dan dalam properti mereka dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak akan dilanggar, dan, Surat Perintah Pengadilan tidak akan diterbitkan, kecuali kalau ada sebab yang mungkin, didukung oleh sumpah atau penguatan, dan secara khusus harus diuraikan tempat yang akan digeledah, serta orang-orang atau barang-barang yang akan disita.

Amandemen V

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara, kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah Juri Agung,

kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut, atau dalam Milisi, saat berdinam pada saat Perang atau bahaya publik; juga tidak seorang pun bisa didakwa atas pelanggaran yang sama sehingga dua kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan; juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri, juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau pemilikan properti, tanpa proses hukum yang benar; juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik, tanpa disertai ganti rugi yang adil.

Amandemen VI

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

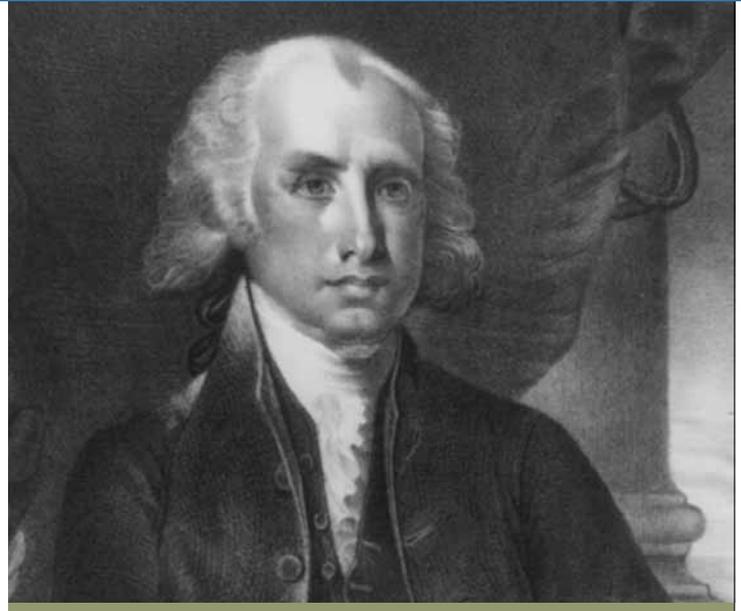
Dalam semua penuntutan kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang cepat dan terbuka, oleh sebuah juri yang netral dari Negara Bagian dan distrik di mana kejahatan dilakukan, dan distrik itu sudah dipastikan sebelumnya oleh hukum, dan diberitahu tentang sifat dan sebab dari tuduhan; dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkan dirinya; disediakan proses bagi perolehan saksi yang meringankan dirinya, dan punya bantuan pengacara bagi pembelaan dirinya.

Amandemen VII

(Diratifikasi pada 15 Desember, 1791)

Dalam kasus berdasarkan hukum rakyat (*common law*), di mana jumlah yang dipertikaikan lebih dari duapuluh

Wakil Presiden John Adams memimpin Senat A.S. ketika cabang Kongres itu menyetujui amandemen-amandemen itu. ©AP Images



Anggota DPR James Madison memainkan peran penting dalam mengarahkan amandemen-amandemen ini melewati Kongres dan kemudian mendesak ratifikasinya di negara bagian asalnya, Virginia. ©AP Images

dolar, hak untuk diadili oleh juri harus dipertahankan, dan tak ada fakta yang telah diadili oleh juri boleh ditinjau kembali di pengadilan lain di Amerika Serikat, kecuali sesuai dengan aturan dari hukum rakyat.

Amandemen VIII

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Uang jaminan berlebihan tidak akan disyaratkan, juga denda berlebihan tidak akan dikenakan, juga tidak hukuman kejam dan luar biasa dijatuhkan.

Amandemen IX

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Penyebutan dalam Konstitusi tentang hak-hak tertentu, tidak boleh dianggap sebagai penolakan atau pengabaian hak-hak lain-lainnya yang dimiliki rakyat.

Amandemen X

(Diratifikasi pada 15 Desember 1791)

Kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga yang tidak dicegah olehnya kepada Negara-Negara bagian, dicadangkan untuk Negara-Negara bagian, atau diserahkan kepada rakyat.

